

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cetakan Keempat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Bagir Manan. 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Bambang Sutiyoso, 2009, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.
- Cekli Setya Pratiwi *et.all*, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: LeIP.
- Dudu Duswara Machmudin, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: Refika Aditama.
- Eny Kusdarini, 2019, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ishayanto, 2016, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: WR.

- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet III*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Suparno, 1992, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*, Jakarta: PT. Parel Mundial.
- Moh. Mahfud, 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Pandapotan Damanik et.all, 2024, *Hukum Administrasi Negara Teori, Prinsip, Dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*, Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Surabaya: Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- _____, 2015, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, et.all, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit.
- Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Banjarmasin: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Rochmat Sumitro, 1978, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, Jakarta: BPHN
- SF. Marbun. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- _____, 2010, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Total Media.
- Sri Hartini, HJ. Sitiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Triwulan, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tesis /Disertasi

Dhani Ihza Erawan, 2023, *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Kejahatan Jabatan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Fence M. Wantu dikutip dari Achmad Hafizar, 2025, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Formil Undang-Undang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jaka Mulyata, 2015, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Kukuh Santiadi, 2023, *Pengaturan dan Penerapan Upaya Administratif dalam Konteks Sistem Peradilan Administrasi di Indonesia*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Popy Nurhafni, 2023, *Tinjauan Yuridis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin (Studi Penelitian Pada Kantor Badan*

Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Tebing Tinggi), Tesis, Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Jurnal

Ade Wijaya, 2019, *Due Process of Law dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 8, No. 3.

Adrian E. Rompis dan Abi M. Radjab, 2012, *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Volume. 6, No.1.

Alec Stone Sweet dan Jud Mathews, 2008, *Proportionality Balancing and Global Constitutionalism*. Columbia Journal of Transnational Law, Volume 47.

Alice Ristroph, 2005, *Proportionality as a Principle of Limited Government*. Duke Law Journal, Volume 55:263.

Bambang Sutiyoso, 2010, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*. Jurnal Hukum, Volume 17, No. 2.

Bisariyadi, 2018, *Penerapan Uji Proporsionalitas Dalam Kasus Pembubaran Partai Politik: Perbandingan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, No. 1

Danel Aditia Situngkir, 2023, *Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*. Ensiklopedia of Journal, Volume 5, No.4.

Irwan Triadi dan Yuli Mega Anggraeni, 2024, *Sejarah Dan Transformasi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Penyelesaian Banding Administratif*. Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Volume 06, No. 4.

Jevantio Yosua Maki, Lendy Siar dan Harly Stanly Muaja, 2024, *Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara Melalui Upaya Administratif*. Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum, Volume 13, No. 4.

Laurensia Frida Alfiani dan Richo Andi Wibowo, 2025, *Proporsionalitas Sanksi Berlapis dalam Konsep Multiple Accountability Forums pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jatiswara, Volume 40, No. 3.

Oksilia Yulita Indah, John Pieris dan Wiwik S. Widiarty, 2024, *Peran Administrasi Negara Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Prima, Volume 7, No. 1.

Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*. Yuridika, Volume 16, No. 2.

Robert Alexy, 2014, *Constitutional Rights, Democracy, and Representation*. Ricerche, Giuridiche, Volume 3, No. 3.

Rustam Efendi Turnip, 2026, *Konsep Dasar Terkait Due Process Of Law*. Jurnal Hukum Justice, Volume 3, No. 2.

Sari Dewi, 2018, *Penjatuhan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Divonis Pidana di Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Perspektif Hukum, Volume 18 No. 1.

Sekar Awal Jana, *et.all*, 2025, *Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Sanksi Administratif Oleh Aparatur Pemerintah*. Jurnal Dimensi Hukum, Volume 9,

No. 11.

Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, 2024, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 8, No. 2.

Subaida Paus Paus, Dwi Pratiwi Markus dan Anggun Kirana, 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Kepegawaian Indonesia*. Jurnal Media of Law and Sharia, Volume 6, No. 2

Tryana Pipit Muliyah, *et.all*, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Nonjob PNS Sesuai Peraturan Perundang-Undangan*. Journal GEEJ, Volume 7, No. 2.

Vicki C. Jackson, 2015, *Constitutional Law in an Age of Proportionality*. The Yale Law Journal, 124:3094.

Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 6, No. 4.

Wulan Febriyanti Putri Suyanto, *et.all*, 2022, *Penerapan Uang Paksa Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Perspektif Siyasah Syar'iyah*. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah, Volume 3, No.3.

Yeremia Pierre Rurugala, Deizen D. Rompas dan Herlyanty Y. A. Bawole, 2022, *Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. LexEtSocietatis, Volume X,

No.4.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Adminisratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Internet dan Sumber Lainnya

Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Nomor 000/KPTS/BPASN/2025.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00000/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Pertimbangan Teknis Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Purjiyanta, Materi Bimtek Kepegawaian tentang Kewenangan Badan Pertimbangan

ASN Dalam Penyelesaian Sengketa Pegawai ASN.

KBBI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, diakses pada 22 Desember 2025

<https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/977-ratio-desidendi-dari-seorang-hakim.html>, diakses 20 Januari 2026.